

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANGKAT
NO. 07 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi pada Inspektorat Kabupaten Langkat)**

TESIS

OLEH

**ESTER DEBORA SURIANA BR NAINGGOLAN
NPM. 121801088**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Langkat No. 07 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Inspektorat Kabupaten Langkat)

Nama : Ester Debora Suriana Br Nainggolan

NPM : 121801088

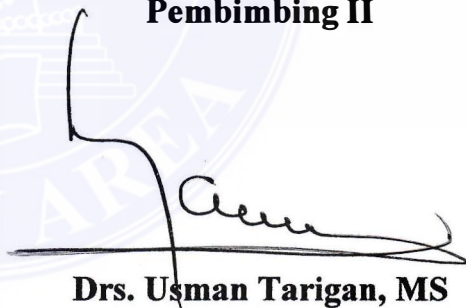
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



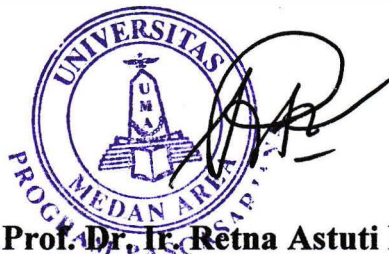
Drs. Usman Tarigan, MS

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 03 Mei 2014

Nama : Ester Debora Suriana Br Nainggolan

NPM : 121801088



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Kariono, MA

Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2013

Yang menyatakan,



Ester Debora Suriana Br Nainggolan

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANGKAT NO.
07 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Studi Pada Inspektorat Kabupaten Langkat

ABSTRAK

Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur Pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut.

Untuk itulah, beberapa pimpinan daerah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pemerintahannya menyadari betapa masalah ini harus dicarikan solusi yang elegan dan tuntas. Pemberian Tambahan penghasilan kepada pegawai diluar gaji tetap yang mereka terima setiap bulannya merupakan salah satu upaya mendekati tingkat penghasilan PNS dengan pemenuhan standar hidup minimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat. Sampel diambil secara purposive sampling, yaitu mereka yang secara langsung berkaitan dan terlibat dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat sebanyak 31 orang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan menggunakan tabel tunggal.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat dilihat dari input, proses, output dan outcomes secara umum telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing-masing variabel kegiatan kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut. Tidak ada masalah yang signifikan yang dihadapi dalam tahap realisasi karena kegiatan ini bersifat administratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan di Kabupaten Langkat adalah faktor keterbatasan sumberdaya manusia dan terbatasnya anggaran yang tersedia dengan banyaknya dan luasnya wilayah pedesaan yang harus mendapat dana tersebut.

Disarankan Penentuan besarnya tambahan penghasilan bagi pegawai harus lebih disesuaikan dengan kinerja yang dihasilkan dan Besarnya Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Langkat disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi / inflasi yang terjadi setiap tahunnya.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Pegawai Negeri Sipil

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang merupakan Sumber dari segala Ilmu Pengetahuan yang baik dan benar sehingga anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :
“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANGKAT NO. 07 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT)”.

Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebahagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sejak awal hingga akhir penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dukungan moriil dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. Warjio, S.H., MA, selaku Ketua Program Studi dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bantuan bimbingan dan arahan kepada Penulis pada saat penulisan tesis ini;
3. Bapak Drs.Usman Tarigan, MS., sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bantuan bimbingan dan arahan kepada Penulis pada saat penulisan tesis ini;

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Administrasi di Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama menempuh pendidikan Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
5. Bapak Sedar Sembiring, SH, Inspektur Kabupaten Langkat yang telah menerima Penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data sebagai bahan tesis ini serta dorongan moril demi kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini;
6. Buat Rekan-rekan mahasiswa/i khususnya angkatan 2012 Magister Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan keceriaan dan dukungan serta arahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan dan dalam penulisan tesis ini;
7. Seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Langkat yang telah membantu dan memberikan semangat serta doa demi keberhasilan dan kesuksesan penulis;
8. Kepada suami-ku tercinta Henryanto Siahaan serta ke 2 (dua) anak-ku tersayang Kevin Juan Partogi Siahaan dan Keisha Enya Br Siahaan yang penuh kesabaran dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan serta semangat dalam mendoakan dan membimbing kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan karya ilmiah tesis ini dengan tepat waktu;

Teristimewa kepada kedua Orangtua yang penulis kasihi Bapak AKP. ESRON NAINGGOLAN, S.H.,MH dan Ibu Romauli br Aritonang, yang telah mengasuh dan mendidik serta tak pernah putus mendoakan penulis dalam dukungan, dana dan perhatian sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan. Juga kepada Amang, Inang dan Saudara/i yang terkasih terimakasih atas doa dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan juga saran-saran yang membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan gambaran dan menambah referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Medan, Maret 2014

Penulis

ESTER DEBORA SURIANA Br NAINGGOLAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Kebijakan Publik.....	5
2.2. Implementasi Kebijakan.....	7
2.3. Gaji dan Upah.....	19
2.4. Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS (TPP.PNS)	21
2.5. Tujuan Diberikan Tunjangan.....	23
2.6. Prinsip-Prinsip Program Tunjangan	25
2.7. Defenisi Kinerja	26
2.8. Penilaian Kinerja	29
2.9. Pengertian Disiplin.....	30

2.10. Disiplin PNS.....	31
2.11. Kriteria Tambahan Penghasilan menurut ketentuan peraturan Bupati Langkat No.07 Tahun 2012 tentang tambahan penghasilan bagi PNS Dilingkungan Kab.Langkat.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.2. Bentuk Penelitian.....	35
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data	35
3.5. Operasionalisasi Variabel	36
3.6. Teknik Analisa Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat	39
4.1.1. Sejarah Singkat	39
4.1.2. Keadaan Geografis	39
4.1.3. Gambaran Umum Demografis	40
4.1.4. Kondisi Ekonomi.....	44
4.2. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Langkat	49
4.2.1. Visi dan Misi	49
4.2.2. Susunan Organisasi.....	51
4.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Langkat	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	65
5.1 Hasil Penelitian.....	65

5.2. Karakteristik Responden.....	65
5.3. Variabel Penelitian.....	65
5.3.1. Input Kebijakan Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 tentang tambahan Penghasilan bagi PNS.....	67
5.3.2. Proses Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 tentang tambahan Penghasilan bagi PNS....	74
5.3.3. Output Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 tentang tambahan Penghasilan bagi PNS	75
5.3.4. Outcomes Kebijakan Peraturan Bupati Langkat Nomor 07 Tahun 2012 tentang tambahan Penghasilan bagi PNS	80
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
6.1 Pendahuluan.....	83
6.2 Saran – saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kabupaten Langkat	41
Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan Kepala Keluarga Kabupaten Langkat	42
Tabel 4.3 Komposisi penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Langkat Tahun 2013	43
Tabel 4.4 Persentase penduduk menurut Status Pendidikan dan jenis kelamin kabupaten Langkat Tahun 2013	43
Tabel 5.1 Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin	65
Tabel 5.2 Distribusi Responden menurut Umur	65
Tabel 5.3 Distribusi Responden menurut Pendidikan	66
Tabel 5.4 Distribusi Responden menurut Kedudukan.....	67
Tabel 5.5 Pendapat Responden tentang ketersediaan Sumber daya Manusia dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2012.....	68
Tabel 5.6 Pendapat Responden tentang ketersediaan Sumber daya Teknologi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2012.....	71
Tabel 5.7 Pendapat Responden tentang ketersediaan Sumber daya Keuangan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2012	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi dan dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintah dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik PNS Pusat maupun PNS Daerah merupakan pilar terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, disamping pilar kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (mekanisme/prosedur). Dengan kata lain, PNS atau birokrat sesungguhnya menjadi penyangga bagi berjalannya suatu pemerintahan.

Adanya birokrasi yang cenderung gemuk lambat dan berbelit-belit, suka memperlambat orang dan membuat persoalan mudah menjadi sulit jelas akan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan menjadi titik berkualitas (Tjokroamidjojo, 2003). Disamping itu kinerja birokrasi bahwa para pembuat kebijakan dipusatlah yang menentukan arah dan tujuan kebijakan, realitas yang ada menunjukkan bahwa para birokrat garda depanlah yang sesungguhnya “menentukan” tujuan program melalui penafsiran mereka akan tujuan program ketika memberikan penjelasan kepada kelompok sasaran di lapangan.(Mah,2008),(Scole,1995),(Snider and Rendon,2008).Pandangan teoritis tentang birokrasi (dari Journal of public procurement,2008). Jika terjadi

demikian, maka suka atau tidak, mau atau tidak PNS sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan haruslah direformasi (ditingkatkan kompetensinya dan dikelola atau di-manage sebaik mungkin). Bisa disebutkan bahwa PNS menjadi subjek sekaligus objek dalam reformasi birokrasi, sehingga sangat tepat apabila reformasi PNS disebut sebagai key leverage reformasi birokrasi.

Akan tetapi potret PNS saat ini menunjukkan gambaran yang belum terlalu mengembirakan. Saat ini, PNS digambarkan mempunyai tingkat profesionalisme yang rendah, kemampuan pelayanan yang tidak optimal, rendahnya tingkat realibility (Kepercayaan), assurance (kepastian/Jaminan), tangibility (sarana dan prasarana yang menjadi alat bantu dan pendukung bagi kelancaran dan keberhasilan aktivitas yang dilakukan), empathy dan responsiveness, tidak memiliki tingkat integritas sebagai pegawai pemerintah sehingga tidak mempunyai daya ikat emosional dengan instansi dan tugas-tugasnya, tingginya penyalahgunaan wewenang (KKN), tingkat kesejahteraan yang rendah dan tidak terkait dengan tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas dan disiplin pegawai (Tangkilisan, 2003). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat. Hal ini pulalah yang menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat/ publik kepada PNS selaku pelayan publik. Sesungguhnya, apa yang menjadi penyebab kondisi yang demikian ? Salah satu penyebab buruknya kinerja PNS dalam memberikan pelayanan publik adalah lemahnya manajemen PNS itu sendiri, yang dimulai sejak perencanaan sampai dengan pemberhentian PNS.

Dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Langkat dan guna mengoptimalkan tugas-tugas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Brinkerhoff, Derick W- Benjamin L. Crosby, 2002. *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., united States of America.
- Islamy, M.Irfan.,2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Israwan Setyoko, Paulus, 2002, *Good Governance di Indonesia; Sebuah Perjuangan..* Pidato Ilmiah Dies Natalis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis.*, Sage publication Inc., USA.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet II, Remaja Rosdakraya, Bandung.
- Nugroho D, Riant, 2004, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Gava Media, Yogyakarta.
- Ripley, Randal B, 1984, *Policy Analysis In Political Science*, The Dorsey Press Chicago, Illionis.
- Catherine L,Mah,Md,FRCPC,"Policy Trade-offs and The Debate Over Mandatory Annual Influenza Vaccination for Health Care Workers",Canadian Journal of public health,2008,Vol.99.No.3

- Keith F. Snider and Rene G. Rendon, "Public Procurement policy : Implication for theory and practice", *Journal of public procurement*, 2008, Vol.8, issue 3, 310-333
- Carol Chetkovich, "What's in a sector ? The Shifting Career Plans of Public Policy Students", *Public Administrations Review*, 2003, Pg.660
- Robbie Waters Robichau and Laurence E. Lynn Jr, "The Implementation Of Public Policy : Still the Missing Link", *The Policy Journal*, 2009, Vol.37, No.1
- Ripley, Randal B & Grace A Franklin, 1986, *Policy Implementation & Bureaucracy*, The Dorsey Press Chicago, Illionis.
- Sutopo, Heribertus, 1998, *Pengantar Penelitian Kuantitatif*, UNS, Surakarta.
- Ripley, Randal B, 1984, *Policy Analysis In Political Science*, The Dorsey Press Chicago.
- Simanjuntak, Payaman J., 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Publik: Transformasi Pemikiran George Edward*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tjokroamidjojo, B. (2003), *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. entry from WWW.pdfdatabase.com.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Frame work*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta .